

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Target Penerimaan PBB 2020 Rp 11 T

► BPRD DKI Jakarta Siapkan Strategi

Palmerah, Warta Kota

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menyebut, target pajak bumi dan bangunan (PBB) DKI Jakarta pada tahun 2020 ini sebesar Rp 11 triliun.

Kepala Humas BPRD DKI Jakarta, Mulyo Sasongko, besaran target ini melebihi realisasi PBB tahun 2019 yang sebesar Rp 9,6 triliun. "Target PBB 2020 sebesar Rp 11 triliun," kata Mulyo, Rabu (22/1).

Mulyo mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa hal. Diantaranya, penagihan dengan pelibatan wali kota yang akan dimulai bulan Februari mendatang, pencairan tunggakan dengan penagihan, dan pelaksanaan *tax clearance*.

"Pembebasan wajib pajak (bagi figur) yang berjasa masih diterapkan," kata dia. Mulyo mengakui masih terdapat wajib pajak PBB yang menunggak hingga akhir tahun lalu. Akan tetapi, ia mengaku belum mengetahui berapa besaran nilainya karena ma-



Pembebasan wajib pajak (bagi figur) yang berjasa masih diterapkan.

Mulyo Sasongko
Humas BPRD
DKI Jakarta

sih dalam proses pendataan (rekonsiliasi).

Lebih lanjut, Mulyo mengatakan, pada 2019 Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan pengenaan pajak dua kali lipat bagi lahan yang tidak terpakai.

Akibat kebijakan itu, sejumlah wilayah di DKI Jakarta harus membayar pajak hingga dua kali lipat. Daerah-daerah tersebut diantaranya di lima jalan protokol yakni Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna

Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Sensus pajak

Di samping itu, Mulyo mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan sensus pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk perbaikan data dan potensi pajak.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, lahan-lahan kosong yang ada disepanjang jalan-jalan protokol di DKI Jakarta akan dikenakan PBB dua kali lipat jika lahan tersebut tidak dibangun atau digunakan.

Namun, kata dia, pemilik lahan akan diberikan potongan pajak sebesar 50 persen jika lahan kosong yang tidak digunakan itu dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

"Jalan-jalan protokol seperti jalan Sudirman, Thamrin, lalu Cawang Sampai Slipi semua lahan kosong di tempat itu yang tidak digunakan, PBB-nya naik dua kali lipat, naik 200 persen bila tidak digunakan atau bila tidak dibangun," kata Anies. (kontan.co.id)